



Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

M. Wahyuddin¹, H. Mustari², Harna³

¹MAS. Muhammadiyah Ereng-Ereng, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar,
Indonesia

³MTsN. Dampang Bantaeng, Indonesia Corresponden

Author Email: ¹bayumuh78@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pattaneteang di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat desa. Jenis Penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang terbentuk di masyarakat Desa Pattaneteang yaitu partisipasi langsung dalam bentuk tenaga dan pelaksanaan, partisipasi dalam bentuk harta benda atau uang, partisipasi dalam bentuk keterampilan yang dimiliki dan partisipasi buah pikiran atau ide. Partisipasi tidak langsung yang ada di desa Pattaneteang dari penjelasan kepala desa membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi di masyarakat Desa Pattaneteang yaitu, secara internal di antaranya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Dari sisi eksternal, terdiri dari faktor Kepimpinan pemerintahan desa, BPD, Peralatan/fasilitas pendukung pembangunan, Tingkat intensitas interaksi dan Tingkat transparansi yang ada di desa.

Kata kunci: *Partisipasi, Pembangunan*

Abstract. The purpose of this study was to find out the community participation in the construction of Pattaneteang Village in Tompobulu Subdistrict, Bantaeng Regency and to know the Factors that influenced the level of village community participation. This research is a research using descriptive qualitative. Methods of collecting data through observation, interviews, and documentation and data analysis carried out data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that community Participation Formed in the Pattaneteang Village community is direct participation in the form of energy and implementation, participation in the form of property or money, participation in the form of ownership and participation of ideas or ideas. The indirect participation in Pattaneteang village from the village head's explanation distinguishes participation into four types, namely first, participation in decision making. Second, participation in implementation. Third, participation in utilization utilization. And Fourth, participation in evaluation. Factors that influence the level of participation in the Pattaneteang Village community are, internally, including age, limited property, education, employment and income. From the external side, it consists of village government leadership factors, BPD, development supporting equipment / facilities, level of intensity of interaction and level of transparency in the village.

Keywords: *Participation, Development*



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, mengoptimalkan pembangunan disegala bidang kehidupan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam aspek pembangunan infrastruktur fisik khususnya, pemerintah melakukan upaya penyejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan yang didasari otonomi daerah, ini dilakukan supaya pembangunan yang dilaksanakan merata, dan jauh dari kesenjangan. Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan beranjak dari kenyataan bahwa persoalan dasar pembangunan itu sendiri pada hakekatnya berada di pedesaan.

Undang-undang RI No. 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Dalam Undang-undang Desa pada pasal 4 tujuan desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang tentu diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan di wilayah pedesaan

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memberdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Bratakusumah (1999: 78),, mengatakan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap perencanaan pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain bagaimana mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subyek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan (Kartasasmita, 1997: 76).

Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di desa Pattaneteang saat ini, telah dibangun berbagai infrastruktur. Selain pembangunan infrastruktur tersebut, di desa Pattaneteang dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS). Bakti sosial ini dilaksanakan tiap hari jum'at dan sebagian masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan masjid, kantor desa, balai desa dan jalan raya. Partisipasi masyarakat desa

Pattaneteang relatif bervariasi³ baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Hal ini ditemukan bahwa masih adanya sebagian masyarakat dalam hal partisipasinya masih sangat rendah di desa Pattaneteang. Selain intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat diatas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan seperti dibidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan dan kurang berperangnya secara maksimal lembaga BPD yang berada di desa tersebut dengan baik. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran/kemauan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Pattaneteang. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: (Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pattaneteang di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

¹ Menurut Pasaribu partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat (1992: 17). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.

Pasaribu (1992: 17) mengemukakan sebagai berikut: (1) rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertiban, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi;

(2) keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal tujuan jelas maka ada ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan; (3) kemahiran menyesuaikan.

Kemahiran menyesuaikan diri

dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi; (4) adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan prasyarat lahirnya partisipasi; dan (5) iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Memahami partisipasi masyarakat, Sutoro Eko dalam Triputro dan Supardal (2005: 176) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kata kunci utama dalam pemberdayaan, partisipasi berkaitan dengan tiga hal yakni: (1) Arena utama partisipasi adalah kebijakan (baik dalam bentuk peraturan maupun program) sebab kebijakan merupakan tempat yang mempertemukan antara pemerintah Desa dan warga masyarakat; (2) Subtansi partisipasi pada prinsipnya mencakup tiga hal yakni suara (voice), akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari; (3) Proses partisipasi adalah berbagai kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah dan warga desa, atau kegiatan yang dilakukan warga dalam menyampaikan suara, akses dan kontrol.

¹ Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagaimana dirangkum Ndraha (1990: 44) berikut ini: (1) partisipasi dalam melalui kontak yang lain (*contact change*) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan; (2) partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/desain proyek; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; (5) partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefittcs*"; (6) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011: 61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan kedalam empat jenis, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi ini bersifat sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan bersama. Dibutuhkan kesepakatan dan suara mufakat karena bagaimanapun juga kegiatan terselenggara demi kepentingan bersama. Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan Ini adalah jenis partisipasi yang menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program itu sendiri. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administratif dan koordinasi serta penjabaran program.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan Partisipasi ini terkait dengan kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

Menurut Raharjo dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012: 87) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang dilaksanakan dengan kegiatan tertentu saja bertujuan untuk tercapainya pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan sulit diatasi.
- b. Partisipasi penuh (*full scale participation*), artinya partisipasi secara keseluruhan dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- c. *Mobilisasi* tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan

masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengajukan kesempatan untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat tidak hanya faktor pendukung, ada juga factor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Menurut Siti Irene Astuti (2011: 57) bahwa factor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat adalah: (1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat; (2) Aspek-aspek tipologi (pembuktian dan jurang); (3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya); (4) Demografis (jumlah penduduk); (5) Ekonomi (Desa miskin/tertinggal)

Partisipasi masyarakat dijelaskan terdiri atas dua yaitu: (a) Faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan (Slamet, 1994: 97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994: 137-143); (b) Faktor- faktor Eksternal, Menurut Sunarti (dalam Jurnal Tata Loka, 2003: 9), factor- factor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stake holder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

B. Konsep Pembangunan

Istilah pembangunan juga menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan "pe" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti bangun dalam arti sadar atau siuman, kedua, berarti bentuk, ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep,

pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukkan pembangunan sebagai:

(1) Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa; (2) Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional; (3) Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun nonfisik (Taliziduhu Ndraha, 1987: 1-2).

Menurut Todaro (2000: 20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Selanjutnya menurut Sondang P. Siagia (1991: 13) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Rostow dan Arief (1996: 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih (Arief, 1996: 30).

Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik dikemukakan oleh Kirdidipoyudo bahwa "Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional." (Bintoro Tjokropamidjojo, 1976: 22).

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 7) bahwa teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan

berbagai kepentingan yang terlibat.

Perencanaan menurut Terry (dalam Malayu Hasibuan, 1993: 95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) bahwa perencanaan merupakan memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1991:3) bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebagai: "suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang".

Pembangunan pedesaan, inilah budaya gotong royong sudah pasti sangat mendarah daging, karena secara konsep masyarakat Desa selalu melakukan kegiatan bersama dan saling bahu membahu, hal ini tidak lepas dari solidaritas sosial masyarakat Desa yang mekanis. Kamanto Sunarto (2004: 128) menjelaskan bahwa masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persamaan sikap dan perilaku, hati nurani kolektif (*collective concidence*) suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, dan bersifat ekstrem secara memaksa. Sedangkan pada masyarakat dengan solidaritas organis, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif atau hati nurani kolektif (*collective concidence*) melainkan kesepakatan yang terjalin diantara kelompok profesi.

Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus dibina dan dikembangkan adalah pembangunan Desa. Berkenaan dengan pembangunan Desa, Daeng Sudirwo, (1985: 63) mendefinisikan pembangunan Desa sebagai berikut: Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

Soewignjo (1985: 24) mengemukakan pembangunan desa yaitu perencanaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sementara Taliziduhu Ndraha (1987: 71) mengemukakan bahwa pembangunan Desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2004: 32) bahwa secara garis besar perencanaan Desa mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sebagai rangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- 2) Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan Desa.
- 3) Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat.
- 4) Perencanaan Desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
- 5) Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian.

Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.TKansil (1983: 251) yaitu:

- 1) Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
- 3) Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
- 4) Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.

- 5) Menggerakkan partisipasi, prakarasa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Karena pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata orang-orang yang diwawancarai.

Penelitian ini dilaksanakan di Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di desa Pattaneteang kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini teknik yang di pakai dalam mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka pada pembahasan hasil penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembangunan di desa Massamaturu sebagai realisasi UU No.6 Tahun 2014 dalam penanggulangan kemiskinan.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pattaneteang di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Terkhusus pokok permasalahan yang dikaji adalah pasal 78 ayat 1 undang-undang nomor 06 tahun 2014 pada yang berbunyi "Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan rencana pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Button Up*. *Button Up Planning* yakni perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawah bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *button up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Berdasarkan RPJMDes Desa Pattaneteang pada tahun 2010 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Pengembangan wilayah, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Bidang Fisik/Infrastruktur
 - a. Jalan Katabung Rusak parah
 - b. Bangunan Kantor Desa sudah rusak
 - c. Tanggul Sawah Bungeng
 - d. Tanggul penahan longsor dusun Katabung
 - e. Jalan Poros Bungeng Rusak Parah
2. Bidang Sosial Budaya
 - a. Masih ada bangunan rumah tidak layak huni
 - b. Sarana kesenian belum ada sementara SDM sudah menunjang
 - c. Pemerintah Desa belum menganggarkan biaya fasilitas umum secara rutin
 - d. Kegiatan pembelajaran anak (pengajian anak-anak santri) dimasjid dan Musholah kurang mendapat perhatian
 - e. Pendidikan anak usia dini (PAUD) belum direhab.
 - f. Belum adanya bangunan Sanggar Tani dan Sanggar Budaya Lokal
 - g. Belum adanya bangunan Gedung Sarana Olah Raga
3. Bidang Ekonomi
 - a. Pada musim kemarau hasil petani berkurang
 - b. Tingkat pengangguran didesa masih tinggi
 - c. Perlu adanya penyuluhan tentang sistem pertanian

- d. Masyarakat petani masih kurang disentuh dalam pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan pertanian. Masyarakat belum di latih secara efektif dalam pengembangan pengelolaan hasil usaha pertanian yang potensial untuk dikelola di UKM.

Kepala desa merupakan lider yang berada di desa sebagai motor penggerak dalam rangka merealisasikan semua program yang telah menjadi kesepakatan bersama melalui musrebang desa. BPD sebagai mitra pemerintah desa sebagai wakil dari setiap dusun yang berada di desa guna menyerap aspirasi dari semua masyarakat yang berada di dusunya masing-masing agar semua program bisaberjalan dengan baik di desa. Hal yang terpenting dalam pembangunan di desa adalah partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang di butuhkan pemerintah desa dalam merealisasikan semua program yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam musrebang desa di tingkat desa.

Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di desa Pattaneteang saat ini, telah dibangun berbagai infrastruktur seperti gedung posyandu, masjid, balai desa, kantor desa, deker, lapangan olahraga, selokan air dan jalan usaha tani. Selain pembangunan infrastruktur tersebut di desa Pattaneteang dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS). Bakti sosial ini dilaksanakan tiap hari jumat, dimana dominan masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan masjid, kantor desa, balai desa dan jalan raya.

Pemerintah desa Pattaneteang sejak tahun 2015 telah mencoba melakukan perencanaan pembangunan partisipatif didalam kerangka menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten. Sebuah langkah positif yang patut dikembangkan lebih lanjut, apalagi hal seperti itu masih dalam taraf pembelajaran yang tentu saja disana-sini masih terdapat kelemahan baik dalam tataran konsep maupun implementasinya di masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan

pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik.

Era otonomi daerah yang tengah dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa menjadi semakin baik dan meningkat. Pendekatan perencanaan pembangunan ini sekaligus menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat. Hal ini tercermin bagaimana masyarakat secara menyeluruh mampu melakukan proses demokratisasi yang baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat mulai dari level RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dusun, desa, kecamatan, sampai kabupaten.

4. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pattaneteang di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi cukup baik di desa Pattaneteang di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa itu sendiri dan perangkat desa tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan suatu program pembangunan di desa.

Dalam prinsip partisipasi menurut Dawam Raharjo (1989:23) terdapat tiga unsur penting yaitu: kesadaran, kemampuan dan kesempatan. Kesadaran adalah sumber motivasi, tapi motivasi itu perlu didukung dengan kemampuan.

Dimaksud dengan kemampuan disini adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis. Berbekal kepada hal itulah maka kelompok bisa mencari kesempatan. Kesempatan disini bukanlah semata-mata kesempatan yang berasal dari luar atau dari atas, melainkan kesempatan yang diciptakan sendiri. Dasar utamanya adalah gagasan yang rasional praktis. Langkah

Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi cukup baik di desa Pattaneteang di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa itu sendiri dan perangkat desa tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan suatu program pembangunan di desa.

Dalam prinsip partisipasi menurut Dawam Raharjo (1989:23) terdapat tiga unsur penting yaitu: kesadaran, kemampuan dan kesempatan. Kesadaran adalah sumber motivasi, tapi motivasi itu perlu didukung dengan kemampuan. Dimaksud dengan kemampuan disini adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis. Berbekal kepada hal itulah maka kelompok bisa mencari kesempatan. Kesempatan disini bukanlah semata-mata kesempatan yang berasal dari luar atau dari atas, melainkan kesempatan yang diciptakan sendiri. Dasar utamanya adalah gagasan yang rasional praktis. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi yang sebenarnya sudah banyak tersedia di masyarakat. Dari prinsip itulah partisipasi dapat berjalan dilingkup masyarakat.

Dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat tidak hanya faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Menurut Siti Irene Astuti (2011: 57) bahwa factor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat adalah: (1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat; (2) Aspek-aspek tipologi (pembuktian dan jurang); (3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya); (4) Demografis (jumlah penduduk); (5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Dengan demikian bahwa beberapa factor munculnya partisipasi masyarakat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu

individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan (Slamet, 1994: 97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994: 137-143).

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam Jurnal Tata Loka, 2003: 9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stake holder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian maka kesimpulannya adalah: (1) Partisipasi yang terbentuk di masyarakat Desa Pattaneteang merupakan partisipasi langsung yaitu: partisipasi dalam bentuk tenaga dan pelaksanaan, partisipasi dalam bentuk harta benda atau uang, partisipasi dalam bentuk keterampilan yang dimiliki dan partisipasi buah pikiran atau ide. Selain itu juga terbentuk partisipasi tidak langsung yang ada di desa Pattaneteang yang diantaranya terdapat beberapa jenis, yakni pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi; (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di desa Pattaneteang yaitu, secara internal di antaranya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Dari sisi eksternal, terdiri dari faktor kepemimpinan pemerintahan desa, BPD, Peralatan/fasilitas pendukung pembangunan, tingkat intensitas interaksi dan tingkat transparansi yang ada di desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut ini adalah beberapa saran

yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, adapun saran tersebut berikut ini: (1) Dalam menciptakan partisipasi masyarakat di desa Pattaneteang, perlu tetap terjaga dengan baik sinergisitas antara pemerintah desa dan masyarakat guna terealisasinya semua program yang di sepakati bersama dalam musrebang desa sehingga menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan amanat undang-undang tentang desa; (2) Perlunya pola *bottom up* sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang lahir berdasarkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat, bukan lagi menjadikan masyarakat sebagai objek program, melainkan sebagai subjek.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif. 1996. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- C.S.T Kansil. 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Eko Sutoro, 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*, Yogyakarta: APMD Press Handayuningtar.
- Kartasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta*.
- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak. B., 1992. *Sosiologi Pembangunan, Tarsito, Bandung. Peraturan Perundang: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*.
- Ndraha, Talizuduhu. a. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara. b. (1985). *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Slamet. 1999, *Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. PAU-SS, UGM, Yogyakarta.
- Sondang P. Siagia. 1991. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi*

Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunarto, Kumanto. 2004. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: CV ALFABETA.

Wahjudin Sumpeno. (2004). *Perencanaan Desa Terpadu.* Banda Aceh: READ.